

## MANAJEMEN PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS MADRASAH

Wandana Simatupang<sup>1</sup> Refi Syahputra<sup>2</sup>, Baginda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>; [akhuka80@yahoo.co.in](mailto:akhuka80@yahoo.co.in)

<sup>2</sup>; [refi.2.syah.89@gmail.com](mailto:refi.2.syah.89@gmail.com)

<sup>3</sup>; [bagindanasution82@gmail.com](mailto:bagindanasution82@gmail.com)

STAI BAHRIYATUL ULUM KH. ZAINUL ARIFIN PANDAN

---

### ABSTRACT

Research purposes; This research elaborates the theory of educational quality with educational management theory which is then oriented towards improving the quality of education in madrasah institutions by integrating several regulations regarding the parallels between national (general) education and madrasah (religious) education. Approach Method; The method used is literature study with descriptive analysis techniques. The data used is quantitative data. Analyzing data by reducing data, presenting data, and concluding and checking research results continuously in the research process. Results and Conclusions; (1) Islamic education is the same and equivalent to national education with the issuance of SKB 3 Ministers on March 24 1975, in an effort to overcome the backwardness of religious education. (2) The integration of madrasahs into the National Education system is strengthened by PP No. 28 of 1990 and Decree of the Minister of National Education No. 0478/U/1992 and No.054/U/1993. Minister of Religion Decree No. 368 and 369 of 1993 concerning the implementation of MI and MTs. MA PP level. No. 29 of 1990, Minister of National Education Decree no. 0489/U/1992 and Decree of the Minister of Religion No. 370 of 1993. (3) School Based Management (SBM). The English terminology is called SBM, which is a management model that provides autonomy or independence to madrasahs in encouraging participatory decision making that directly involves all madrasah residents in accordance with service standards set by the Central, Provincial, Regency and City Governments.

Keywords: Management, Madrasah Quality

---

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian; penelitin ini mengelaborasi antara teori mutu pendidikan dengan teori manajemen pendidikan yang kemudian berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dilembaga madrasah dengan mengintegrasikan beberapa regulasi akan keparalelan antara pendidikan nasional (umum) dengan pendidikan madrasah (agama). Metode Pendekatan; metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Penganalisisan data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan serta memeriksa hasil penelitian secara berkelanjutan dalam proses penelitian. Hasil dan Kesimpulan; (1) Pendidikan Islam sama dan setara dengan pendidikan nasional dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri Tanggal 24 Maret 1975, dalam upaya meretas ketertinggalan pendidikan agama. (2)Integrasi madrasah ke dalam system Pendidikan Nasional ini dikuatkan dengan PP No. 28 Tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 0478/U/1992 dan No.054/U/1993. SK Menteri Agama No. 368 dan 369 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Tingkat MA PP. No. 29 Tahun 1990, SK Mendiknas No. 0489/U/1992 dan SK Menteri Agama No. 370 Tahun 1993. (3)Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) *School Based Management* (SBM). Terminologi bahasa Inggris disebut SBM, yaitu model pengelolaan yang memberikan otonom atau kemandirian kepada madrasah dalam mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## 1. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan, merupakan salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting untuk membangun suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan suatu negara terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas pada saat sekarang ini, pendidikan yang berkualitas hanya akan tumbuh jika terdapat lembaga pendidikan bermutu. Salah satu kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan khusus (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai agama dan ideologi negara

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan seakan tidak pernah berhenti. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Beragam program inovatif ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan tidak hanya dengan merubah kurikulum. Perubahan akan lebih bermakna dan sampai pada tujuan dengan perubahan praktik belajar yang tentunya menggunakan model belajar yang efektif dan efisien, Semuanya dilakukan dalam rangka pembaharuan pendidikan yang lebih baik (Ali Mustafa, 2015). Peningkatan mutu atau *quality improvement* adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu barang atau jasa agar dapat sukses disetiap barangnya atau jasa agar dapat sukses setiap perusahaan, institusi, lembaga harus melakukan proses secara simetris dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Jafri & Rahmat, 2017: 62).

Iskandar (2017: 268), memastikan dalam jurnalnya bahwa, masalah mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan sekolah yang bermutu dibutuhkan jiwa gotongroyong yang melibatkan berbagai kalangan. Jangan bersetigma bahwa menjadikan pendidikan bermutu bertumpu pada sekolah, lembaga atau instansi pendidikan semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua anak bangsa. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 8 dan 9 menyatakan bahwa, masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selaras dengan pendapat di atas Syafaruddin (2021: 31), menjelaskan memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab menteri pendidikan saja atau dirjen, rektor, dekan dan kepala sekolah semata. Semua yang peduli nasib bangsa di masa depan harus merasa terpenggil untuk membenahi benang kusut yang melilit dalam sistem pendidikan nasional. Semua pihak yang terkait dengan kebijakan dan operasionalisasi pendidikan bertanggung jawab untuk membenahi pendidikan nasional.

Menurut Alfian dalam jurnalnya (2019: 94), berdasarkan praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini, dan langkah-langkah yang telah dirintis (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) serta kebijakan ke depan, konsep mutu baik dalam pengertian absolut, relatif (standar) maupun kepuasan pelanggan atau konsumen dalam hal ini siswa, wali murid, ketiganya harus sinergis, bersamaan dan saling melengkapi.

Kepedulian pemerintah beserta berbagai kalangan telah dan terus menerus berupaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui pengembangan model pembelajaran yang dielaborasi dan teknologi kekinian, sistem evaluasi dan inovasi pengawasan melalui berbagi fitur aplikasi media elektronik juga pelatihan dan peningkatan kualitas guru yang juga tidak bisa dikesampingkan. Karena mereka adalah ujungtombak memperbaiki kualitas siswa sebagai

acuan teladan yang berjalan secara proaktif. Namun juga tidak kalah penting yaitu kajian manajemen pendidikan sebagai pisau teori analisis dalam perbaikan mutu pendidikan.

Tim Depdiknas (*National Report on The Development of Education Country Indonesia, 2001*). Secara faktual partisipasi pendidikan masyarakat terhadap pendidikan sampai tahun 2000 sudah menggembirakan. Hal ini ditandai dari Angka Partisipasi Kasar (APK) atau tingkat pendaftaran pada tahun 1999/2000 pada jenjang sekolah dasar mencapai 28,5 juta siswa. Kemudian pada sekolah lanjutan pertama (SLTA) angka partisipasi kasarnya mencapai 9,4 juta siswa. Dan pada sekolah menengah atas angka partisipasi kasar mencapai 5,3 juta siswa. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan seperti diurai di atas menuntut kesesungguhan para menejer pendidikan dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu lulusan di masa depan (Syafaruddin, 2021: 24)

Namun demikian adanya, semua pemangku dan pemerhati pendidikan jangan berpuas diri, karena keikutsertaan masyarakat jadi anggota pada tahap implementasi program pembangunan terutama pada pendidikan, sering dipahami sebagai bentuk mobilitas untuk berbagai kepentingan pemerintah semata. Oleh karenanya perlu mengedukasi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat untuk pendidikan adalah perwujudan tanggung jawab semua pihak untuk mencetak generasi emas demi keberlangsungan bangsa dan negara lebih baik kedepannya.

Kajian manajemen pendidikan sebagai ilmu sosial yang sangat adaptif dengan kemajuan dan perkembangan keilmuan yang pada hakikatnya semua bermuara pada pengetahuan akal dan disebut ilmu yang bertahta pada logika manusia. Sebagaimana Inu Kencana (2019: 471), menyimpulkan bahwa ilmu manajemen adalah manusia itu sendiri, sedangkan obyek formalnya adalah pengaturan. Jadi, peningkatan mutu pendidikan sejatinya tidak terlepas dari kajian ilmu manajemen. Karena tidak hanya berbicara pengaturan, juga bagaimana membenahi manusia itu sendiri dalam suatu tatanan lembaga pendidikan. Dalam jurnal Heru (2017: 119), menyebutkan dalam kurun tahun 2017 belakangan menemukan hasil pencariannya diberbagai jurnal bahwa setidaknya ada 17 kajian jurnal yang berhubungan antara pendidikan (sekolah) dengan masyarakat, ditambah satu jurnal yang dimuatnya. Hasil kesimpulannya bahwa, masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karenanya, masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, baik langsung atau tidak langsung

Dijelaskan Elhuda dan Hudan (2018: 6-7) bahwa mengenai penyelenggaraan pendidikan di madrasah masih ditemukannya berbagai kendala yakni dari aspek manajemen termasuk kepemimpinan, proses maupun hasil pendidikan. Hal ini ditandai dari potensi akademik peserta didik yang masuk ke madrasah pada umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan calon-calon peserta didik yang hendak masuk ke sekolah, baik itu negeri ataupun swasta. Kadang kala diantara penyebabnya adalah berlatar belakang ekonomi keluarga. Artinya, latar belakang kehidupan ekonomi keluarga kelas menengah dan kelas bawah lebih banyak memilih masuk ke madrasah. Di samping itu juga, terbatasnya tenaga pendidik (guru) yang memiliki kualifikasi pendidikan yang kurang memadai dan ditambah lagi dengan minimnya dukungan dana dari pemerintah dan masyarakat bagi peningkatan mutu madrasah

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1) Manajemen Pendidikan**

Mengawali kajian manajemen pendidikan, terlebih dahulu menguraikan secara sederhana pengertian manajemen secara umum. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, dari kata *to manage* (pengelolaan). Secara umum artinya mengurus atau kemampuan mengatur suatu bidang pekerjaan (Kamus Oxford, 2005). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah mempergunakan daya secara efektif dalam mencapai sasaran, dan pemimpin sebagai penanggung jawab atas berjalannya suatu perusahaan atau organisasi (DPN KBBI, 2008).

Manajemencara secara terminologi, yang berasal dari beberapa ahli diantaranya, Ordway Tead, *management is the proces and agency which direct and guides the operatiouns of an organization of established arms*. Maksudnya manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Inu K. Syafii, 2019: 16). Sedangkan menurut Kata Luther G. (1965: 145), manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Memandang manajemen sebagai ilmu karena manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik.

Meskipun cenderung mengarah pada suatu fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen dan karenanya belum dapat diterima secara universal arti dari manajemen itu sendiri. Namun demikian terdapat konsensus bahwa manajemen menyangkut derajat keterampilan tertentu, misalnya bagaimana menggerakkan, memotivasi, mengkomunikasikan dan seterusnya, sehingga tercipta kerjasama yang baik. Untuk memahami secara sederhana, manajemen adalah mengelola suatu tatanan komunitas (organisasi) secara bersama-sama dengan menentukan target capaian yang telah disepakati. Sesudah menjabarkan dengan sederhana pengertian dari manajemen, berikutnya mengkaji secara konseptual yang lebih spesifik dari kajian manajemen pendidikan. Untuk mengawali substansi kajian, berikut ini pengertian manajemen pendidikan menurut beberapa ahli. Danim (2010: 18) Manajemen pendidikan suatu proses mengoptimalkan sumberdaya kependidikan yang tersedia dan dapat diakses untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif efisien.

Sedangkan Rohit (2010: 86). menjelaskan manajemen pendidikan adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Dari beberapa pengertian manajemen pendidikan menurut ahli yang telah diuraikan, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen pendidikan pengoptimalan sumberdaya pendidikan dengan bekerjasama dan dilakukan secara sistematis untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Selaras dengan pendapat di atas, tujuan pokok mempelajari manajemen pendidikan adalah untuk memperoleh cara, teknik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana dan fasilitas, material maupun spritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif efisien. Tujuan-tujuan tersebut ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Depdiknas, 2011: 4)

Salah satu artikel dari UIN Raden Intan Lampung menjelaskan secara rinci tujuan manajemen pendidikan antara lain;

1. Terwujudnya susunan belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
3. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
4. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan
5. Teratasinya masalah mutu pendidikan

Setelah mengkaji seputar arti dari manajemen pendidikan beserta tujuannya, dari beberapa konsep di atas, akhirnya dapat diambil inti pokoknya bahwa, manajemen pendidikan tidak hanya sebatas mengkaji bagaimana mengelola manusia dan sumber daya, seperti aset atau sarana prasana dalam dunia pendidikan, namun lebih dari itu esensi dari kajian manajemen adalah memberdayakan sumber daya yang ada, dengan menjadikan tantangan dan kelemahan tersebut menjadi potensi kekuatan dan menciptakan peluang yang lebih gemilang. Sedangkan muara dari kegemilangan memberdayakan potensi tersebut, tentunya memiliki barometer yang jelas yaitu produktifitas kerja

dan kepuasan pelanggan dalam dunia pendidikan tentunya masyarakat. Alhasil, keterbatasan menjadikan semangat dan motivasi memberdayakan potensi, sehingga masyarakat tidak hanya mengakui tapi ikut merasakan mutu dan kualitas dari lembaga pendidikan tersebut.

Menutup sub kajian ini, untuk memperkuat argumentasi penulis di atas bahwa keseimbangan manajemen pendidikan sebagai sarana memperkuat mutu pendidikan, Syafaruddin (2021: 26-27) mempertegas dalam bukunya, salah satu strategi yang menentukan mutu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah untuk kepentingan bangsa di masa depan adalah peningkatan kontribusi manajemen pendidikan yang berorientasi mutu (*quality oriented*). Bahkan di halaman berikutnya beliau, menuliskan kata lain bahwa kegagalan dalam perbaikan mutu pendidikan akibat manajemen yang lemah maka menimbulkan kegagalan generasi baik dalam dimensi mikro maupun makro (2021: 35).

## 2) Mutu Pendidikan

Dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan “bermutu” jika *input*, proses dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Bila *performance*-nya dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh *stakeholder (user)*, maka suatu lembaga pendidikan baru bisa dikatakan unggul. Lantaran tuntutan persyaratan kualitas yang dikehendaki para pengguna jasa terus berubah dan berkembang dan terus berkembang, maka pengertian mutu juga bersifat dinamis, terus berkembang dan terus berada dalam suasana rivalitas yang terus menerus (Mastuhu dalam Zainuddin & Muhammad, 2004: 101). Dalam konteks pendidikan, menurut Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip Mulyasa, pengertian mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan (Mulyasa. 2003: 96).

Banyak ragam dan corak pendefinisian mutu. Para pakar mendefinisikan mutu sesuai dengan bidang dan upaya apa yang akan dilakukan untuk menjadi suatu kepercayaan bagi pelanggan atau penerima manfaat dari apa yang dikerjakan. Selain itu, mutu juga terkadang dipararelkan dengan kualitas, sehingga mutu dilandaskan dari sesuatu yang berkualitas tinggi. Namun sebaliknya tidak akan pernah dikatakan bermutu kalau tidak ada penilaian berkualitas di dalamnya. Dalam kajian ini, penulis tidak bermaksud menjabarkan antara mutu dan kualitas, namun terfokus kepada pendidikan yang bermutu. Maka untuk lebih memusat kepada kajian, tentunya diawali dari beberapa definisi mutu pendidikan.

Pengertian mutu pendidikan sangat berbeda dan mengandung makna jauh berlainan dengan sekedar pengertian mutu atau kualitas. Namun perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk samapi pada pengertian mutu pendidikan. Oleh sebab itu terlebih dahulu kerangka dasar penertian mutu pendidikan. Secara leksikal, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, derajat (kpandaian, kecerdasan dan sebagainya (Fandy Tjiptonodan Anastasia Diana, 2009 : 34).

Adapun jika dilihat dari segi korelasi mutu dengan pendidikan, menurut pendapat Busa & Coleman (2012: 193), mutu adalah terjemahan dari *quality*. Istilah “mutu” diartikan sebagai kebutuhan pelanggan, pemenuhan kebutuhan pelanggan dan pektrum mutu adalah mencakup produk, proses dan layanan. Berbeda halnya dengan pendapat Ramayulis dan Mulyadi (2014: 169) menyatakan, pendidikan bermutu itu tidak hanya dari kualitas lulusannya, akan tetapi juga dilihat sejauh mana lembaga tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, baik pelanggan internal (guru dan tenaga kependidikan) maupun pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan). Pendapat tersebut di atas, bersambut dengan pendapat Syafaruddin (2021: 43) bahwa mutu pendidikan, merupakan aplikasi konsep manajemen mutu yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai organisasi jasa kemanusiaan (pembinaan potensi pelajar) melalui pengembangan pembelajaran berkualitas agar melahirkan kelulusan yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat dan pelanggan pendidikan lainnya.

Alhasil, mutu pendidikan adalah kemampuan mengelola sekolah dengan konsep manajemen mutu sehingga melahirkan regenerasi dengan kelulusan yang siap terjun dalam tatanan sosial

masyarakat dari berbagai bidang dan kegiatan. Karena begitu sinerginya antara mutu pendidikan dengan masyarakat, karena memang pada prinsipnya masyarakat adalah pengejawantahan dari produk (*output*) pendidikan, maka penutup sub kajian ini akan membahas pendidikan dan masyarakat.

Penjaminan mutu pendidikan adalah amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyebutkan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Perlunya pelatihan khusus perwakilan sekolah untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah. Untuk itu BKPSDM, tanggal 17 s.d 21 Februari 2020 bidang diklat menyelenggarakan Pelatihan Penjaminan Mutu Sekolah. Peserta Pelatihan adalah Kepala Sekolah Dasar yang sekolah tempat tugasnya belum menjadi Sekolah Model, sebanyak 30 (tiga puluh) orang. dengan tujuan :

- a. Mempersiapkan perwakilan sekolah untuk melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu Internal Sekolah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
- b. Memberi Bekal Pengetahuan dan Wawasan Peserta untuk tentang teknis pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Sekolah,
- c. Memberi keterampilan Peserta untuk melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu Internal Sekolah.
- d. Menyatukan persepsi dan langkah sekolah-sekolah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan Penjaminan Mutu Internal Sekolah agar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Secara sederhana Hadis dan Nurhayati (2014 : 69), menjelaskan masalah permasalahan besar dunia pendidikan di Indonesia, yaitu; 1). Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, 2), Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, 3). Masih lemahnya manajemen pendidikan.

Mengelaborasi kedua konsep di atas ada, iklim yang membuat fokus untuk mengakajinya yaitu, krisis moral yang begitu dahsyat di dalam masyarakat karena memberikan indikasi rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat. Kalimatnya sama-sama tertumpu pada 'masyarakat'. Artinya bahwa, pendidikan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat supaya lebih memiliki akhlak yang baik adalah dengan dasar pendidikan, dan instansi pendidikan akan bisa mengimplementasikan keilmuan tentunya ditengah kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya semua kembali menjadi masyarakat seutuhnya.

Karenanya kesinergian antara pendidikan dengan masyarakat dijelaskan Purwanto dalam bukunya yang sekarang sudah cetakan ke-24 (2017) bahwa, hubungan atau kerjasama antara sekolah dengan masyarakat digolongkan menjadi tiga jenis, edukatif, kultural dan kontitusional. Berikut ini penjelasan menurut analisis penulis:

- a. Hubungan Edukatif. Diantara implementasinya dengan mengadakan pertemuan secara periodek antara guru-guru dengan perwakilan masyarakat disebut komite sekolah, sehingga keterbukaan segala informasi di sekolah maupun keselarasan kebutuhan masyarakat dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.
- b. Hubungan Kultural. Para guru dan pelajar di sekolah adalah budaya berpikir sedangkan masyarakat adalah tempat mempraktekkan hasil pikiran. Karenanya para dewan guru di sekolah memberi ruang bagi pelajar untuk mengabdikan keilmuannya ditengah-tengah masyarakat, misalnya membantu kegiatan-kegiatan sosial, memfasilitasi untuk kegiatan pengembangan budaya dimasyarakat misalnya attraksi kesenian dan sebagainya. Sehingga selain hubunga sekolah dengan masyarakat menambah keakraban juga memberi nuansa bagi pelajar untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, yang juga pada akhirnya pelajar tersebut akan kembali ke lingkungan masyarakat seutuhnya.

- c. Hubungan Institusional. Hubungan ini adalah inti mengembangkan profesi, baik institusi swasta seperti perusahaan pertanian maupun institusi pemerintahan seperti puskesmas dan yang lainnya.

Sedangkan hubungan pendidikan dengan politik. Dijelaskan Paulo dalam bukunya *Politik Pendidikan* (2010), untuk melepaskan budaya dan ideologi paradoksal, maka pendidikan harus mampu yaitu, *pertama*, para intelektual mendiskusikan masalah politik dan kekuasaan dengan nilai pendidikan. Karena pendidikan sebagai pengewajantahan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menghasilkan manusia yang bukan hanya pintar tapi juga benar. *Kedua*, pendidikan mengajarkan politik dan kekuasaan untuk mempertegas keyakinan mencapai impian yang sesuai norma kehidupan manusia. *Ketiga*, pendidikan menumbuhkan nilai emansipatif. Melalui nilai tersebut politik dan kekuasaan akan berorientasi pada perjuangan masa depan yang lebih pariatif. Alhasil hubungan pendidikan dengan politik akan mencapai kemesraannya apabila politikus itu sendiri awali adalah orang-orang yang berpendidikan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan dengan seutuhnya.

### **3. METODE**

Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Kajian lebih kepada penelaahan pustaka dan referensi yang dianggap memiliki relevansi. Peneliti mengikuti Miles dan Huberman diterjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi (2009:137) yaitu dalam menganalisis data. Upaya yang digunakan adalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan serta memeriksa hasil penelitian secara berkelanjutan dalam proses penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah**

Kajian ini, setidaknya memuat dua variabel yaitu, peningkatan mutu dan pendidikan madrasah, kemudian selanjutnya mengintegrasikan bagaimana sejatinya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Terminologi "*modernisasi madrasah*" mulai menguat saat orde baru melancarkan manuver-manuver politik pendidikannya, baik melalui jalan formalisasi yaitu usaha pengertian madrasah, maupun melalui jalan strukturalisasi, yaitu perjenjangan madrasah dengan mengacu pada aturan Departemen Pendidikan (Depag RI, 2005:5). Pendidikan Islam kala itu masih tersisih dari sistem Pendidikan Nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 menteri tanggal 24 Maret 1975 yang berusaha mengembalikan ketertinggalan Pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan Nasional. SKB ini mencoba meregulasi madrasah secara integral komprehensif. Era ini dikenal dengan era baru madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya dengan porsi kurikulum pendidikan umum 70% dan pendidikan agama 30%.

Terbitnya SKB ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya untuk bidang non agama. Kebijakan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena ijazahnya dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan sederajat; lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi; dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat, serta membuka peluang siswanya memasuki peluang wilayah pekerjaan modern. Secara perasional, integrasi Madrasah ke dalam sistem Pendidikan Nasional ini dikuatkan dengan PP Nomor 28 tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0478/U/1992 dan nomor 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP. Keputusan-keputusan ini ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama nomor 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sedangkan tentang MA diperkuat dengan PP nomor 29 tahun 1990, SK Mendiknas nomor 0489/U/1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam)

dan SK Menteri Agama nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada lagi perbedaan antara MI, MTs, MA dengan SD, SMP, dan SMA selain ciri khas agama Islamnya.

Secara leksikal, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berfokus pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2003:1). Penyebutan MBM merupakan analogi dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dalam bahasa Inggris disebut *School Based Management* (SBM). Lebih lanjut Nurhartati dkk, menguraikan bahwa (MBS) yang secara terminologi bahasa Inggris disebut SBM, yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada madrasah dalam mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Nurhartati, dkk., 2003: 2).

Seharusnya menyadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan bahkan kemajuan lembaga pendidikan Islam. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Bila ada lembaga pendidikan Islam yang maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan tersebut keterlibatan masyarakat yang maksimal. Inilah kunci kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan dan harus dikelola atau dimenej dengan baik. Sekolah atau madrasah salah satu organisasi yang mempunyai suatu kekuatan untuk membantu dan mengantarkan peserta didik menuju cita-cita yang mereka harapkan. Sekolah yang baik mutunya adalah sekolah yang bisa mencetak peserta didik berprestasi tinggi dan dapat memanfaatkan guru-guru yang berkualitas baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Pengertian Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM) secara umum, manajemen mutu dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas kepada madrasah dan mendorong partisipasi secara langsung kepada warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah dan karyawan) dan masyarakat (wali, tokoh masyarakat, dll) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Partisipasi atau pelibatan warga madrasah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan madrasah, maka rasa memiliki mereka terhadap madrasah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab, dan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatkan dedikasi warga madrasah dan masyarakat terhadap madrasah. Inilah esensi partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi madrasah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya madrasah maupun partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah tersebut kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Artikel Pendidikan, [www.dikdasmen.depdiknas.go.id](http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id))

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tujuan MBS dengan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah *pertama* meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. *Kedua*, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. *Ketiga*, meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada sekolahnya. *Keempat*, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selain itu, MBS memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa dikarenakan adanya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan personel, peningkatan profesionalisme guru, penerapan reformasi kurikulum serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan (Nurkolis, 2003: 1) Adapun tujuan dan maksud implementasi MMBM adalah untuk 1). Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; 2). Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam menyelenggarakan

pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; 3). Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu madrasah; dan 4). Meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai (Bahtiar, Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Sinjai Barat).

Dari ke empat hasil kajian di atas secara sederhana memberikan gambaran bahwa, tujuan mutu MBM adalah kemandirian mengelola dan meberdayakan sumber daya yang ada, melalui kerjasama masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan Manfaat MMBM, dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MMBM adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MMBM pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MMBM memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka (artikel dari UIN Raden Intan Lampung halaman 50).

Sejalan dengan artikel di atas, bahwa manfaat kurikulum Kementerian Pendidikan sekarang yaitu tentang merdeka belajar, Ridwan (Harian Waspada, 7 Maret 2022), memberikan pengertian dengan tegas diantara konsepnya adalah pemberian ruang kepada sekolah untuk mengaktualisasikan visi misinya. Tidak hanya untuk warga sekolah semata, namun partisipasi orang tua, masyarakat juga sangat dibutuhkan, sehingga tercipta sinergitas antara sekolah dengan masyarakat setempat.

## REFERENCES

- B. Miles. Matthey, & Huberman, A. Michael (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta; Universitas Indonesia. UI-Press.
- Danim, Sudrwan. (2010). *Profesionalitas dan Etika Profesi Guru*. Bandung Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI. Gramedia Pustaka.
- Fitzedward Hall, (2005). *Kamus Oxford English*.
- Gulich, Luther, (1965). *Educational Administration* (ed) New York Mc, Graw Hill. Co.
- In'am Esha (Ed.). (2004). *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Upaya Merespons Dinamika Masyarakat Global*, Yogyakarta: Aditya Media dan UIN Pres.
- Iskandar, Jamaluddin Iskandar. (2017). "Penerapan Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Madrasah" Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar *Jurnal Idaarah*, Vol. I, No. 2.
- Kencana, Inu, Syafiie. (2019). *Ilmu Manajemen*, Jogjakarta: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- kepemimpinan-guru- memberdayakan-anak. *Jurnal* (internet). <http://www.blogguru.web.id>
- Lexy J, Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mai, Elfridawati, Dhuhani. (2017). "Manajemen Humas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Studi Kasus Di Madrasah Ibtidiyah Terpadu (Mit) As-Salam Ambon" *Jurnal al-iltizam*, Vol.2, No. 2 Desember"
- Naquib, Syed. (1979). *Aims and Objective of Islamic Education*, Jeddah: Hodder and Stoughton King Abdul Aziz University.
- Novianty, Jafri D. dan Abdul, Rahmat, Bawahi. (2017). *Manajemen Mutu Terpadu*. Yogyakarta, Zahir Publising, 2017.
- Ramayulis dan Mulyadi (2014), *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sitimorang, Ridwan. *Mempertegas Pengertian Merdeka Belajar Kurikulum Baru*. *Harian Waspada*, 7 Maret 2022.
- Syafaruddin. (2021). *Manajemen Mutu Terpadu Dalam pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Syahputra, Refi. (2021). "Implementasi Kepemimpinan Guru Dalam Pembelajaran MAS Darul Muta'allimin Tanah Merah Kabupaten Aceh Singkil Dan SMAS Hidayatullah Kota Subulussalam". *Jurnal Mudabbir*, Vol. 1. No.2. \
- <http://ebookbrowse.com/> (internet
- Tony, dan Coleman, Marianne. (2012). *Manajemen Mutu: Kepemimpinan Pendidikan*, Yogyakarta: IRdSOD.
- Tri, Alfian, Kuntoro. (2019). "Manajemen Mutu Pendidikan Islam (SD Negeri Kalinusu 01 Bumiayu, Brebes. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7 No. 1 Mei. DOI: e-ISSN 2598-4845; p-ISSN 2355-018X.
- William, hrode, A, And Dan Voich, Jr, (1974), *Organization and Management: Basic System Concepts*, Malaysia: Irwin Book
- Yamin, Martinis & Maisah. (2010). *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta; Gaung Persada. GP Press.
- Yaqien, Nurul. (2015) "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah". Vol. 7, No. 2, Januari-Juni